

ANALISIS SWOT PELAKSANAAN PARIWISATA HALAL OLEH DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

Oleh : Vivi Sepnia Nelson

Email : vivisepnia761@gmail.com

Pembimbing : Dr. Adianto, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Halal tourism is an additional service provided to meet the experiences, needs and desires of tourists, especially tourists who are Muslim. Halal tourism has a concept of Muslim Friendly. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of halal tourism by the Riau Tourism Office and how to formulate a strategy for halal tourism. This research uses descriptive qualitative research methods. The collection of necessary data, both primary and secondary data, is collected through interviews, observation and documentation and then analyzed so that conclusions can be drawn from existing research problems. Based on the results of the SWOT analysis, the recommended strategy is Agresive Strategy where this situation is very profitable, because the strengths that are owned can be utilized for the opportunities that exist. The results of this study indicate that the implementation of halal tourism through the Riau Tourism Office has not been running optimally and in a deep strategy implementing halal tourism by intensifying publications, increasing supervision, and increasing culinary tourism branches.

Keywords: *Halal tourism, Strategy, SWOT*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Sumatera. Ibukota dan kota terbesar di Riau adalah Pekanbaru. Provinsi Riau dikenal dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Selain itu, ada beberapa suku lain yang ada di Provinsi Riau antara lain suku masyarakat pedalaman seperti suku sakai, talang mamak, bonai, hutan serta suku lainnya yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di wilayah Indonesia yang diberikan otonomi daerah untuk mengelola seluruh potensi di daerahnya. Provinsi Riau sebagai salah satu tujuan wisata dan merupakan pusat kebudayaan melayu di Indonesia memiliki berbagai wisata menarik.

Sebagai salah satu sektor unggulan, Provinsi Riau terus bergerak dalam mengembangkan potensi pariwisata sebagai magnet yang sangat menarik dan menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah Sumatera. Keberagaman potensi wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung, baik pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara. Sektor pariwisata di era globalisasi saat ini menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia, dimana pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pemasok pendapatan Negara serta pendorong perekonomian masyarakat.

Potensi sektor pariwisata yang tersebar luas di Indonesia yakni di setiap provinsinya harus dikelola oleh lembaga yang memiliki keahlian ataupun

kemampuan dalam bidang tersebut agar proses pengelolaan potensi pariwisatanya dapat terkelola dengan baik. Salah satu provinsi dengan potensi pariwisata yang ada di Indonesia adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki beragam potensi pariwisata dan daya tarik wisata baik daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata buatan, serta kegiatan/atraksi pariwisata.

Trend pariwisata dunia saat ini dihadiri oleh suatu konsep pariwisata baru yang disebut pariwisata halal. Trend pariwisata terus berkembang hingga saat ini, dan pariwisata halal berhasil menarik perhatian dari setiap negara di dunia untuk menerapkan konsep tersebut di negaranya masing-masing. Pariwisata halal memiliki konsep berupa *muslim friendly* yang artinya pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan fasilitas, daya tarik dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan khususnya wisatawan yang beragama Islam. Secara sederhana pariwisata halal ini bertujuan untuk mempermudah umat Islam untuk melaksanakan kaidah-kaidah agama Islam walaupun sedang berada di tempat wisata.

Jika melihat di ranah dunia, prestasi Indonesia dalam menerapkan pariwisata halal dapat dikatakan membanggakan karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir peringkat Indonesia sebagai negara dengan wisata halal terbaik di dunia terus meningkat. Berikut adalah peringkat negara dengan wisata halal terbaik di dunia berdasarkan penilaian *Global Muslim Travel Index (GMTI)*:

Tabel 1.2 Peringkat Negara dengan Wisata Halal Terbaik di Dunia

| Peringkat | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | Negara | Skor | Negara | Skor | Negara | Skor |
| 1 | Malaysia | 82,5 | Malaysia | 80,6 | Malaysia & Indonesia | 78 |
| 2 | United Arab Emirates | 76,9 | Indonesia | 72,8 | - | - |
| 3 | Indonesia | 72,6 | United Arab Emirates | 72,8 | Turkey | 75 |
| 4 | Turkey | 72,4 | Turkey | 69,1 | Saudi Arabia | 72 |
| 5 | Saudi Arabia | 71,4 | Saudi Arabia | 68,7 | United Arab Emirates | 71 |

Sumber : *Global Muslim Travel Index*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peringkat Indonesia yang terus meningkat hingga tahun 2019 Indonesia memiliki skor penilaian yang sama dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Penobatan peringkat tersebut diberikan langsung oleh

Global Muslim Travel Index (GMTI) dan Indonesia berhasil mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Dalam penilaian wisata halal ada 3 kelompok kriteria wisata halal yang diulas.

Kriteria pertama yaitu destinasi ramah keluarga, untuk kriteria destinasi ramah keluarga indikator penilaiannya mencakup destinasi yang ramah bagi keluarga, keamanan umum dan bagi wisatawan Muslim, serta jumlah kedatangan wisatawan Muslim. Kriteria kedua yaitu layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah Muslim, ada tiga indikator penilaian dalam kriteria ini yakni pilihan makanan dan jaminan halal, akses ibadah, fasilitas di bandara, serta opsi akomodasi. Kemudian kriteria ketiga yaitu kesadaran halal dan pemasaran destinasi, dalam kriteria ini terdapat indikator dalam penilaiannya yakni kemudahan komunikasi, jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan Muslim, konektivitas transportasi udara, serta persyaratan visa.

Keberhasilan Indonesia meraih prestasi sebagai salah satu negara dengan wisata halal terbaik tentu didukung dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sektor pariwisata oleh setiap provinsi di Indonesia. Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata atau yang saat ini dikenal sebagai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus melakukan pengembangan pariwisata khususnya dalam penerapan konsep pariwisata halal sebagai salah satu contohnya adalah dengan membuat sertifikasi halal bagi para pekerja untuk industri pariwisata halal atau *halal tourism*, Pembuatan sertifikasi halal ini bekerjasama dengan Pemerintah Singapura karena di Singapura terdapat foundation *Global Muslim Travel Index* (GMTI) . tujuannya adalah untuk meyakinkan wisatawan mancanegara yang

datang ke destinasi ramah muslim tersebut.

Selain itu, sebagai bentuk acuan kepada setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk menerapkan konsep pariwisata halal tersebut dan guna mendorong percepatan pengembangan pariwisata halal di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan penilaian provinsi dengan wisata halal terbaik di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) dan penilaian provinsi dengan wisata halal terbaik di Indonesia tersebut telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Penilaian tersebut dilakukan langsung oleh Indonesia yang bekerjasama dengan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) dengan menggunakan 4 indikator utama dalam menilai yang indikator tersebut ditetapkan langsung oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI). 4 indikator penilaian tersebut yaitu aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi dan disetiap provinsi memiliki potensi pariwisata yang berbeda-beda. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki program pengembangan pariwisata halal memiliki konsep agar setiap potensi pariwisata yang dimiliki oleh setiap provinsi tetap menerapkan konsep pariwisata halal guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang beragama Islam dalam melakukan perjalanan wisata. Selain mempermudah masyarakat Muslim dalam melakukan perjalanan wisata, dengan konsep pariwisata halal yang diterapkan disetiap provinsi tentu juga akan mengundang wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Indonesia dan hal tersebut akan

berdampak baik bagi devisa negara. Oleh karena itu, pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan penilaian provinsi dengan pariwisata halal terbaik yang dilakukan oleh *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) sebagai berikut:

Tabel 1.3 Top 5 Provinsi dengan Pariwisata Halal Terbaik di Indonesia

| Peringkat | 2018 | | 2019 | |
|-----------|------------------------------|------|------------------------------|------|
| | Provinsi | Skor | Provinsi | Skor |
| 1 | Nusa Tenggara Barat (Lombok) | 58 | Nusa Tenggara Barat (Lombok) | 70 |
| 2 | Aceh | 57 | Aceh | 66 |
| 3 | Jakarta | 56 | Riau & Kepulauan Riau | 63 |
| 4 | Sumatera Barat | 55 | Jakarta | 59 |
| 5 | Jawa Barat | 51 | Sumatera Barat | 59 |

Sumber : *Indonesia Muslim Travel Index*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya Riau dan Kepulauan Riau berada di peringkat ketiga pada tahun 2019 sebagai provinsi dengan pariwisata halal terbaik di Indonesia. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang dilakukan oleh Provinsi Riau karena pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2018 Provinsi Riau mendapatkan peringkat keenam sebagai provinsi dengan pariwisata halal terbaik di Indonesia. Dapat dilihat keseriusan Provinsi Riau dalam menerapkan konsep pariwisata halal sehingga saat ini Provinsi Riau menjadi

peringkat ketiga dengan pariwisata halal terbaik di Indonesia dan bersaing dengan 34 provinsi yang ada.

Atas prestasi yang didapatkan Provinsi Riau tersebut, pemerintah Provinsi Riau semakin serius dalam mengembangkan pariwisatanya. Hal ini dibuktikan dengan Gubernur Provinsi Riau yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal yang disahkan pada tanggal 5 April 2019. Peraturan Gubernur ini diterbitkan sebagai bentuk langkah mempermudah pengembangan pariwisata halal karena telah memiliki dasar hukum yang kuat dan telah disahkan.

Dengan terbitnya peraturan tersebut maka akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan dalam menikmati kunjungan wisata halal yang ada di Provinsi Riau. Karena pada saat ini, kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara ke Provinsi Riau terus meningkat oleh karena itu Provinsi Riau dan instansi terkait harus dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2019 pasal 4 ada beberapa poin yang menjadi ruang lingkup pariwisata halal salah satunya yaitu Destinasi Pariwisata Halal. Destinasi pariwisata adalah suatu tempat yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Saat ini pariwisata halal perlu dilaksanakan secara maksimal khususnya di kota Pekanbaru karena kota Pekanbaru merupakan ibukota serta pusat dari Provinsi Riau dan memiliki potensi

destinasi pariwisata halal. Provinsi Riau dengan kebudayaan mayoritasnya melayu dan masyarakat yang madani seharusnya pariwisata halal menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan di kota Pekanbaru. Apabila di kota Pekanbaru pariwisata halal telah maksimal maka hal tersebut akan menjadi contoh bagi daerah atau kabupaten lain agar ikut melaksanakan pariwisata halal di tempat masing-masing.

Dinas Pariwisata Provinsi Riau memfokuskan pelaksanaan pariwisata halal khususnya di Kota Pekanbaru. Untuk mewujudkan maksud tersebut, perlu dilakukan pemetaan dan identifikasi terhadap Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Kawasan Pengembangan Pariwisata Halal serta dukungan peraturan daerah.

Selain itu, Kota Pekanbaru meraih beberapa penghargaan dibidang pariwisata, diantaranya penghargaan Unggulan Destinasi Wisata Halal dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga diikutsertakan oleh Pemerintah Pusat dalam wilayah 10 Destinasi Prioritas Nasional bersama lima Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia yaitu: Kota Tanjung Pinang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur sebagai penguatan destinasi Pariwisata Halal Nasional.

Dinas Pariwisata Provinsi Riau sebagai penanggungjawab utama pelaksanaan pariwisata halal di Provinsi Riau saat ini harus dapat bertindak cepat dalam menyikapi pengembangan pariwisata halal serta penerapan pariwisata halal di Provinsi Riau. Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal hanya

saja hingga saat ini sejak disahkan nya Peraturan Gubernur Provinsi Riau tentang Pariwisata Halal belum terlihat tindakan pelaksanaan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Sudah hampir memasuki tahun pertama sejak Peraturan Gubernur Provinsi Riau tentang pariwisata halal, berdasarkan pernyataan Dinas Pariwisata Provinsi Riau saat ini Dinas Pariwisata Provinsi Riau masih proses membentuk tim percepatan dalam menyusun dan melaksanakan tindakan apa saja yang diperlukan untuk pariwisata halal di Provinsi Riau hal tersebut disebabkan pergantiannya struktur Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis SWOT Pelaksanaan Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau**”.

1.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Bagaimana strategi pelaksanaan pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau melalui analisis SWOT?
2. Bagaimana pelaksanaan pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menyusun perumusan strategi pelaksanaan pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan

pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

1.3 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata. Terutama bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam menerapkan pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti- peneliti berikutnya yang memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama.

KONSEP TEORI

2.1 Analisis SWOT

Menurut Rangkit (2006:18) analisis SWOT adalah identitas faktor-faktor sistematis untuk merumuskan strategi organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT bisa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan dilingkungan bisnis maupun dilingkungan internal organisasi. Faktor-faktor strategi internal yaitu kekuatan dan kelemahan yang juga akan menentukan apakah perusahaan mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada sambil menghindari ancaman-ancaman

Metode analisis SWOT merupakan metode analisis yang paling dasar dalam melakukan analisis strategi, yang bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan ataupun suatu

topik dari 4 empat sisi yang berbeda. Hasil dari analisis ini biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan suatu perusahaan atau organisasi dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan yang dimiliki dan juga menghindari berbagai ancaman yang terjadi.

Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 (empat) sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah:

a. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (opportunities) yang ada.

b. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan.

c. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada.

d. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan. SWOT adalah singkatan dari:

1. S = Strength (kekuatan).
2. W = Weaknesses (kelemahan).
3. O = Opportunities (Peluang).
4. T = Threats (hambatan).

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang yang terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah

perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavski mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. **Nuridin usman (2002:70).**

dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu:

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan unsur tersebut.

2.3 Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut **Wahab dalam Utama (2015:20)** pariwisata mengandung tiga unsur antara lain: manusia yakni unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata, tempat yakni unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri dan waktu yakni unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut dan selama berdiam ditempat tujuan. Jadi definisi pariwisata adalah salah satu dari industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam hal mengaktifkan sektor

produksi lain di dalam Negara yang penerima wisatawan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat membantu dalam menemukan data yang diperlukan, sehingga pemilihan lokasi penelitian yang tepat sangat menunjang dalam memperoleh informasi dan data yang valid. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pariwisata Provinsi Riau karena Dinas Pariwisata Provinsi Riau merupakan penanggung jawab dalam strategi pengembangan pariwisata halal di Provinsi Riau. Dinas Pariwisata Provinsi Riau beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Bandar Serai Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Pelaksanaan pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria- kriteria atau ciri- ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi di bidangnya, dengan kata lain informan tersebut memahami dan menguasai permasalahan yang menjadi topik penelitian dan bersedia memberikan informasi serta data- data yang valid terkait dengan kebutuhan penelitian, adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau oleh CI.
2. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pekanbaru oleh HS.

3.4 Jenis Sumber Data

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang valid serta relevan dengan masalah- masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer di peroleh peneliti secara langsung dari khalayak baik melalui wawancara, observasi dan alat-alat lainnya. Data primer ini didapatkan dengan cara observasi lapangan dan wawancara informan yang dalam hal ini mewawancarai pihak Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Kepala Bidang, dan pihak lainnya yang

mengetahui Strategi Pelaksanaan pariwisata halal.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan. Data Sekunder diperoleh dari sumber kedua atau secara tidak langsung berbentuk hasil karya seperti buku-buku, laporan penelitian, terdahulu, undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal-jurnal, media internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya :

1. Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal
2. Undang-undang No.10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata
3. Profil Provinsi Riau pelaporan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung lokasi penelitian. Proses pengamatan tersebut meliputi melihat, merekam, dan mencatat aktivitas yang terjadi. Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis aktivitas-aktivitas, perilaku serta objek-objek yang terlihat di lokasi penelitian dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai data pendukung penelitian. Dengan pengamatan tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana proses pengawasan ritel di kota Pekanbaru, serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan tersebut di lapangan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*) maupun secara tidak langsung melalui sambungan telepon atau media lainnya ataupun terlibat langsung dalam satu kelompok tertentu yang terdiri dari beberapa informan.

3.5.3 Dokumentasi

Data yang diambil dengan metode dokumentasi, dengan tujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan langsung dengan penelitian ini dapat berupa file foto, dan lain-lain Selama proses penelitian berlangsung. Penelitian juga dapat mengumpulkan berbagai dokumen yang merupakan dokumen publik berupa koran, makalah, laporan ataupun dokumen privat seperti buku harian, surat, *e-mail*). Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh oleh penulis dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh pihak terkait dengan beberapa dokumentasi yang diambil langsung oleh peneliti dilapangan untuk melengkapi data primer dan data sekunder.

3.6 Analisis Data

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Cara yang ideal dengan mencampurkan prosedur umum dengan langkah-langkah mudah. Mengilustrasikan pendekatan linear dan hirarki yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam praktiknya melihat pendekatan ini lebih beragam

saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pelaksanaan Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau

peneliti menggunakan teori menurut Wahab (1990:45), adapun unsur-unsur pelaksanaan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target
3. Adanya pelaksanaan

Ketiga unsur tersebut menjadi indikator dalam menerapkan pariwisata halal di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Untuk lebih lanjut peneliti membahas mengenai analisis swot penerapan pariwisata halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau berdasarkan teori penerapan dan dianalisis menggunakan teori SWOT. Program menjadi salah satu indikator dalam penerapan pariwisata halal di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru karena program merupakan rencana yang telah disusun agar dalam proses penerapannya menjadi lebih efektif. bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau saat ini telah menyusun beberapa program yakni sosialisasi dan yang paling utama adalah sertifikasi halal khususnya di rumah makan ataupun restoran. Pada dasarnya pariwisata yang umum dengan pariwisata halal itu sama, namun pariwisata halal memiliki kelebihan yaitu memudahkan para wisatawan muslim untuk berwisata, karena untuk wisatawan yang beragama Islam pasti memiliki beberapa syarat serta aturan dalam berwisata sehingga wisatawan muslim tetap dapat melaksanakan kewajibannya, contohnya seperti adanya pemberitahuan mengenai kuliner yang halal untuk

langkah-langkah dari yang spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda.

dikonsumsi atau haram untuk dikonsumsi, kemudian adanya sarana serta prasarana untuk beribadah.

Sertifikasi menjadi program yang utama diterapkan di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru namun saat ini masih banyak rumah makan atau restoran di Kota Pekanbaru yang belum memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan pemikiran beberapa masyarakat yang tidak memperlakukan hal tersebut karena berpikir bahwa lingkungan saat ini mayoritas Islam jadi tidak perlu khawatir dalam hal memilih tempat makan atau restoran. Bagi masyarakat setempat mungkin sertifikasi halal tidak terlalu diperhatikan akan tetapi bagi wisatawan asing khususnya wisatawan muslim sertifikasi halal sangat diperlukan karena ketika wisatawan muslim tidak melihat label atau logo halal pada tempat makan yang dikunjungi maka mereka akan pergi dan mencari tempat makan yang telah memiliki sertifikasi halal. Namun hal tersebut bukan berlaku hanya bidang kuliner saja tapi juga pada hal-hal yang menunjang kebutuhan mereka untuk berwisata serta beribadah

Adanya kelompok target yang dimaksud adalah masyarakat atau lainnya yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program yang telah dimiliki tersebut. Dalam hal ini kelompok target yang akan dibahas adalah sasaran yang telah direncanakan oleh pihak Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam menerapkan pariwisata halal. Sasaran dari program yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau tidak meliputi seluruh individu akan tetapi yang menjadi sasaran disini adalah pihak-pihak

yang memiliki peran dalam penerapan dan pelaksanaan pariwisata halal.

Target wisatawan untuk mendapatkan pelayanan jasa pariwisata halal adalah wisatawan yang beragama Islam khususnya wisatawan dari timur tengah karena wisatawan muslim mayoritas dari timur tengah. Dinas Pariwisata Provinsi Riau sedang berusaha agar wisatawan muslim dari timur tengah tersebut segala kebutuhan wisata dan kebutuhan ibadah nya dapat terpenuhi karena biasanya wisatawan dari timur tengah memiliki cukup banyak syarat serta aturan agar wisata yang mereka lakukan sesuai dengan syariat agama. Selain itu target utama pariwisata halal ini adalah wisatawan dari timur tengah khususnya yang beragama Islam karena bagi wisatawan dari negara lain dan yang non-muslim tidak terlalu memiliki syarat ataupun aturan dalam berwisata sehingga Dinas Pariwisata Provinsi Riau hanya tinggal fokus mengembangkan atau membangun destinasi pariwisata agar menjadi lebih baik lagi.

Salah satu contoh pelaksanaan pariwisata halal yang telah dilaksanakan di salah satu destinasi wisata yang ada adalah di Pantai Cinta atau Teluk Jering, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Destinasi wisata Pantai Cinta tersebut telah menerapkan konsep pariwisata halal berupa memberikan informasi apabila telah memasuki waktu shalat bagi masyarakat muslim dan disediakan tempat beribadah dan tempat wudhu terpisah bagi pria dan wanita agar masyarakat muslim yang sedang berwisata tetap dapat menjalankan kewajibannya untuk beribadah. Menurut Dinas Pariwisata Provinsi Riau hal tersebut akan terus dikembangkan baik tempat beribadahnya, kulinernya, dan unsur lainnya yang ada di

destinasi wisata Pantai Cinta, Kabupaten Kampar tersebut.

Fokus pelaksanaan pariwisata halal di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau saat ini adalah mengsertifikasi halal seluruh sektor kuliner yang memang menggunakan bahan serta menyajikan kuliner halal agar wisatawan asing yang beragama muslim dapat memilih makanan serta minumannya dengan lebih mudah.

1.2 Perumusan Strategi Pelaksanaan Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana cara perumusan strategi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam melaksanakan pariwisata halal dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu metode penyusunan strategi untuk perusahaan ataupun organisasi yang menganalisis beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal. SWOT sendiri terdiri dari singkatan S (strength), W (weakness), O (opportunities) dan T (threats) yang jika diartikan secara berurutan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

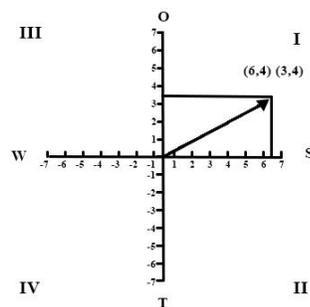
Dimana dalam metode ini harus memperhatikan berbagai faktor seperti faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) guna menyusun perencanaan yang matang pada organisasi, program atau produk yang disiapkan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Analisis SWOT yaitu dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktivitas memerlukan suatu perencanaan strategis yaitu suatu pola atau struktur yang saling mendukung dan melengkapi menuju kearah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan agar dapat memilih

dan menetapkan strategi dan sasaran, sehingga tersusun program-program yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis yang tajam dari para pegiat organisasi. Salah satu analisis yang cukup populer dikalangan pelaku organisasi adalah analisis SWOT.

Analisis faktor internal eksternal untuk program pelaksanaan pariwisata halal di provinsi riau dengan hasil penilaian analisis SWOT menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Analisis nilai pada kondisi internal pada dinas pariwisata provinsi riau menunjukkan nilai skala kekuatan adalah **16,6** dan nilai skala kelemahan **10,2**. Jadi kekuatan dinas pariwisata provinsi riau lebih besar **6,4** poin dibandingkan dengan kelemahan.
2. Analisis nilai pada kondisi eksternal dinas pariwisata provinsi riau menunjukkan nilai skala peluang adalah **11,2** dan nilai skala ancaman adalah **7,8**. Jadi peluang pada dinas pariwisata provinsi riau dalam penerapan pariwisata halal lebih besar **3,4** poin dibandingkan dengan ancaman. Untuk Analisis SWOT hasil internal dan eksternal dari faktor-faktor diatas adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2 Hasil Analisis SWOT



Dari hasil analisis SWOT diatas dapat dilihat bahwa nilai skala SWOT terletak pada kuadran I yaitu mendukung

Strategi Agresif. Strategi Agresif artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Konsep dasarnya agresif merupakan segala sesuatu yang sifatnya meningkat ke arah yang lebih baik atau lebih maju. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan lebih besar dari pada kelemahan yang ada, sedangkan peluang yang muncul lebih besar dari pada ancaman yang ada.

Strategi SO merupakan suatu keadaan yang bagus dan baik bagi dinas pariwisata provinsi riau mendapatkan peluang dilindungi dinas dalam program pelaksanaan pariwisata halal dan mempunyai beberapa kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan pariwisata halal melalui Dinas Pariwisata Provinsi Riau belum berjalan dengan maksimal, hal ini bisa dilihat dari penelitian berikut. Dalam penelitian ini penulis melihat dari sejauh mana pelaksanaan pariwisata halal di provinsi riau dengan meengacu pada adanya beberapa program yang dilaksanakan namun belum maksimal karena beberapa kendala yang dihadapi, dari segi target masih banyak yang belum mengikuti arahan penerapan pariwisata halal di Provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru, dari segi dalam menerapkan pariwisata halal di Provinsi Riau belum berjalan secara maksimal karena menurut Dinas Pariwisata Provinsi Riau pariwisata halal itu mirip dengan pariwisata pada umumnya hanya saja dengan konsep

pariwisata halal pelayanan jasa yang diberikan akan menjadi lebih baik bagi wisatawan-wisatawan muslim.

- b. Perumusan Strategi pelaksanaan pariwisata halal dengan menggunakan Analisis SWOT. Menghasilkan strategi SO dimana kekuatan dan peluang kuat dan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Strategi Agresif**, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Situasi ini sangat menguntungkan, karena kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk peluang yang ada.

Strategi yang dipakai pada kuadran I adalah Strategi SO, dimana menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dalam konsep penerapan pariwisata halal, setelah melakukan analisis SWOT pada setiap indikator faktor internal dan eksternal dinas sosial maka dapat dirumuskan strategi SO sebagai berikut:

1. Menggencarkan publikasi mengenai wisata halal yang berada di provinsi riau agar informasi tersebut sampai kepada masyarakat luas, bukan hanya penduduk sekitar. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Aktif dalam berbagai sosial media dinas pariwisata riau.
- b. Menggunakan jasa influencer asal provinsi riau.

2. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Pekanbaru contohnya seperti penggunaan billboard, baliho, megatron ataupun videotron yang ada di Kota Pekanbaru untuk mensosialisasikan pelaksanaan pariwisata halal karena saat ini masih banyak yang belum memahami pariwisata halal.

3. Meningkatkan pengawasan pada wisata halal agar kualitasnya tetap terjamin meskipun terjadi peningkatan wisatawan. Rekomendasi yang dapat dilakukan dengan membentuk tim jaminan kualitas per-destinasi.

4. Memperbanyak cabang wisata kuliner namun dengan tetap mempertahankan cita rasa asli dari masing-masing tempat kuliner tersebut agar ketika hari libur nasional wisatawan tidak hanya berkerumun di satu tempat. Selain itu, lowongan pekerjaan juga dapat semakin banyak dengan adanya cabang-cabang wisata kuliner baru. Rekomendasi yang dapat dilakukan seperti bantuan lahan.

6.2 SARAN

1. Untuk membuat strategi penerapan pariwisata halal bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang dinas yang ada untuk membuat strategi yang lebih baik sehingga implementasi program dapat dilaksanakan dengan maksimal dan efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT yang dapat membantu dinas pariwisata Provinsi Riau dalam melihat, menilai dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi.
2. Pemerintah perlu memfasilitasi pelaku UKM dalam melakukan sertifikasi halal. Jaminan kehalalan produk merupakan faktor penting dalam pengembangan kawasan pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Creswell, W. J. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif*,

Kuantitatif, dan Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

David , F. R 2004. *Manajemen Strategi Konsep edisi ketujuh* . Jakarta : PT Pernerhdindo .

Rankuti,freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik perbedaan kasus bisnis.* Gramedia: Pustaka Utama , Jakarta

Rankuti,freddy. 2015. *Personal SWOT Analysis.* Gramedia: Pustaka Utama, Jakarta

Siagian, Sondang. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya.* Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal :

Adrian Hadi Hamzana. 2017. *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat.* Jurnal Media Komunikasi dan hokum Vol.17, No.2 Hal 1-16

Chandra Eko Wahyudi Utomo. Mochamad Hariyadi. 2016. *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota.* Jurnal Strategi dan Bisnis Vol.4, No.2 Hal 159-175

Demeiati Nur Kusumaningrum. Aulia Mawaddah Fairuz. Erima Puspita Putri. Putri Amalia. 2017. *Trend Pariwisata Halal Korea Selatan.* Seminar Nasional dan Gelar Produk.

Irwan Raharja. 2016. *Strategi Pengembangan Organisasi dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai BAPEDDA Tingkat 1 Jawa Tengah.* Jurnal Administrasi Kantor Vol.4, No.2 Desember Hal 418-446

Yusuf Adam Hilman. 2017. *Strategi Pembangunan pariwisata internasional berbasis pertanian organic.* Jurnal Sosial Politik Vol.5, No.1 Hal 82-92

Dokumen :

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kepariwisataaan dan Tujuan Wisata

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan